

AFTA Bagi Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Peluang

Perdagangan bebas (*free trade*) sudah menjadi suatu kebutuhan yang disadari oleh masyarakat ekonomi dunia. Persepsi bahwa segala macam bentuk proteksi selalu mempengaruhi kesejahteraan rakyat. Konsep ini sering dikenal dengan konsep Welfare Loss atau Dead Weight Loss. Kenyataan inipun disadari oleh Indonesia dan diwujudkan melalui penandatanganan pada pencanangan AFTA (ASEAN Free Trade Agreement). Penandatanganan itu menimbulkan suatu konsekuensi baik secara ekonomi maupun politik bagi Indonesia.

Konsekuensi logis pertama yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah penghilangan segala bentuk proteksi dalam negeri terhadap barang impor dari negara-negara anggota ASEAN. Proteksi yang sering dilakukan oleh negara-negara di dunia adalah tarif.

Artikel ini akan mengungkap tentang tinjauan secara ekonomi penerapan AFTA (ASEAN Free Trade Area) terhadap perekonomian Indonesia baik dari segi tantangan (*challenge*) dan peluang (*opportunity*) yang akan dihadapi oleh Indonesia, serta kebijakan apa yang perlu diambil.

Integrasi Ekonomi

Potensi konsumsi dalam daerah yang terintegrasi akan lebih besar daripada jumlah konsumsi dari daerah yang terpisah-pisah. Artinya potensi konsumsi wilayah ASEAN yang terpadu akan lebih besar daripada jika konsumsi masing-masing negara anggota ASEAN dijumlahkan. Hal ini akan terjadi jika perdagangan antar

negara ASEAN dibebaskan, dimana semua tarif, kuota dan hambatan non tarif lainnya yang membatasi mobilitas komoditi dan factor produksi dieliminasi. Dengan terbentuknya intergasi ekonomi internasional, paling tidak sebagian dari hambatan dan distorsi dalam perdagangan dan investasi akan berkurang. Integrasi ekonomi, yang terdiri dari paling sedikit dua negara secara teoritis ada 7 jenis, yaitu, (1) preferential tariff agreement; (2) partial custom union; (3) free trade area; (4) custom union; (5) common market; (6) economic union; (7) total economic union. Bentuk integrasi tersebut diatas terkait dengan eliminasi tarif dan hambatan bukan tarif dalam perdagangan internasional, termasuk juga harmonisasi berbagai macam kebijakan ekonomi (fiscal, moneter, industri, regional, transportasi dan lain-lain). ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang dibentuk tahun 1992 merupakan integrasi ekonomi internasional yang masih relatif muda dibandingkan dengan European Free Trade Area (EFTA) yang didirikan tahun 1961.

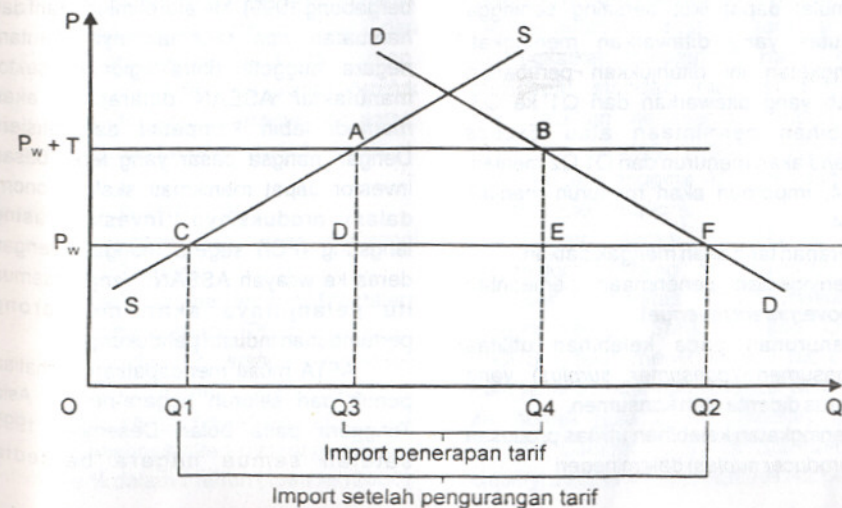
Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan secara singkat tinjauan teoritis penerapan tarif. Jika struktur pasarnya

persaingan sempurna, pengaruh hambatan non tarif (misalnya kuota) terhadap perdagangan dan kesejahteraan masyarakat adalah ekuivalen dengan tarif. Tapi Bhagwati (1965) membuktikan, jika pasarnya monopoli, pengaruhnya tidak ekuivalen.

Tinjauan Teoritis Penerapan Tarif

Berbagai macam literatur ekonomi telah menjelaskan bahwa setiap penerapan segala macam bentuk proteksi baik tarif maupun bukan tarif akan menurunkan kemakmuran (*prosperity*). Suatu proteksi yang sering dilakukan suatu negara adalah penerapan tarif pada komoditas tertentu. Penerapan tarif jelas secara teori perdagangan internasional akan sangat menurunkan kemakmuran. Penerapan tarif menimbulkan *dead-weight loss* atau *welfare loss*. *Dead-weight loss* adalah suatu kondisi dimana kehilangan surplus konsumen atau *consumer surplus* tidak dapat terkompensasi oleh peningkatan pendapatan pemerintah dan produksi dalam negeri (lihat Appleyard (1995), Samuelson (2000), dan Krugman (1995)).

Gambar 1: Akibat Penerapan Tarif



Drs. Ahmad Jamli, MA

Lektor FE UGM
Yogyakarta

Sumbu horizontal pada gambar 1 di atas adalah kuantitas barang. Sumbu vertikal adalah harga. Kurve DD menunjukkan kombinasi kuantitas yang diminta oleh konsumen dalam negeri pada berbagai macam tingkat harga. Kurve SS menunjukkan kombinasi barang yang diproduksi oleh produsen dalam negeri pada berbagai macam tingkat harga. P_w adalah harga dunia untuk barang tertentu. T adalah besarnya tarif yang diterapkan.

Pemerintah sebelum menerapkan tarif sebesar T pada produk itu. Harga yang ditanggung konsumen adalah harga dunia (ditunjukkan pada gambar 1 harga sebesar P_w). Kuantitas yang diminta konsumen domestik sebesar Q2 dan produsen memproduksi sebesar Q1 sehingga akan terjadi kelebihan permintaan (excess demand) sebesar Q1Q2. Excess demand ini akan ditutup dengan mengimpor barang luar negeri. Impor domestik adalah sebesar Q1Q2.

Misalkan pemerintah melakukan proteksi dengan menerapkan tarif sebesar T. Harga yang harus ditanggung konsumen adalah sebesar $P_w + T$ sehingga terjadi penurunan kuantitas yang diminta dari Q2 menjadi Q4. Peningkatan harga ini akan direspon oleh produsen. Produsen yang tidak dapat bersaing dengan harga sebesar P_w mulai dapat ikut bersaing sehingga kuantitas yang ditawarkan meningkat. Peningkatan ini ditunjukkan perubahan jumlah yang ditawarkan dari Q1 ke Q3. Kelebihan permintaan atau *Excess demand* akan menurun dari Q1 Q2 menjadi Q3Q4. Impor pun akan menurun menjadi Q3Q4.

Penerapan tarif akan mengakibatkan:

1. Peningkatan penerimaan pemerintah (*government revenue*).
2. Penurunan pada kelebihan utilitas konsumen (*consumer surplus*) yang harus diderita oleh konsumen.
3. Peningkatan kelebihan utilitas produsen (*producer surplus*) dalam negeri.

Penerimaan pemerintah yang akan didapatkan adalah sebesar kuantitas impor dikalikan dengan besarnya tarif. Penerimaan pemerintah digambarkan pada gambar 1 adalah sebesar segi empat ABDE. Penurunan surplus konsumen adalah sebesar trapezium ($P_w + T$ BFP_w). Peningkatan producer surplus adalah sebesar trapezium ($P_w + T$ ACP_w).

Consumer surplus yang hilang ternyata tidak semuanya dapat terkompensasi oleh peningkatan producer surplus dan penerimaan pemerintah. Kehilangan secara sia-sia ini disebut *deadweight loss*. Gambar 1 mengilustrasikan bahwa terjadi *deadweight loss* sebesar segitiga ADC dan segitiga BEF.

ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN Summit IV yang diadakan di Singapura, pada bulan Januari 1992 telah mencanangkan sebuah pengurangan tarif (*tariff reduction*) sebagai langkah awal menuju perdagangan bebas. Tujuan utama AFTA adalah meningkatkan daya saing (*competitiveness*) negara-negara anggotanya (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Vietman, Laos, Myanmar, yg bergabung 1977 dan Kamboja yg bergabung 1999). Melalui eliminasi tarif dan hambatan non tarif lainnya diantara negara anggota (intra-regional), sektor manufaktur ASEAN diharapkan akan menjadi lebih kompetitif dan efisien. Dengan pangsa pasar yang lebih besar, investor dapat menikmati skala ekonomi dalam produksinya. Investasi asing langsung (FDI) segera mengalir dengan deras ke wilayah ASEAN. Yang kesemua itu selanjutnya akan mendorong pertumbuhan industri pendukung.

AFTA mulai mendapatkan perhatian penuh dari seluruh negara-negara Asia Tenggara pada bulan Desember 1995 setelah semua negara bersedia

menandatangani perjanjian penurunan tarif secara bersama. Konsep CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) adalah suatu mekanisme pelepasan tarif dari 0-5% pada tahun 2003 untuk setiap barang yang memenuhi persyaratan 40% ASEAN content. Dalam Pertemuan Asean Economic Ministry (AEM) September 22-23, 1994 di Chiangmai, Bangkok disetujui percepatan realisasi AFTA dari 15 menjadi 10 tahun, yang berarti menjadi 1 Januari 2003 yang sebelumnya 2008. Disepakati pula memasukkan produk pertanian yang belum diproses ke dalam skema CEPT.

Program Penurunan Tarif

Untuk Produk Manufaktur Dan Produk Industri Pertanian.

Dibawah skema CEPT ada 2 macam program, yaitu Program Jalur Cepat (*the Fast Track*) dan Program Jalur Normal (*the Normal Track*)

A. Program Jalur Cepat.

- a. Tarif diatas 20% akan diturunkan menjadi 0-5% dalam 7 tahun. (1 Januari 2000).

- b. Tarif sebesar 20% dan yang lebih kecil 20% akan diturunkan dalam 5 tahun (1 Januari 1998)

Program Jalur Cepat tersebut meliputi 15 kelompok produk, yakni; *vegetable oils*, bahan kimia, pupuk, produk karet, pulp dan kertas, furniture kayu dan rotan, produk permata dan intan, semen, produk farmasi, plastik, produk kulit, tekstil, produk keramik dan gelas, elektronik dan tabung katoda tembaga.

B. Program Jalur Normal

- a. Tarif diatas 20% akan dikurangi dalam 2 tahap:
Pertama, sampai dengan 20% dalam 5 tahun (1 Januari 1998).
Kedua, dari 20% sampai dengan 0-5% dalam 5 tahun (1 Januari 2003)
- b. Tarif yang besarnya 20% dan dibawahnya akan dikurangi menjadi 0-5% dalam 7 tahun (1 Januari 2000)

Kesepakatan CEPT tahun 1992 belum memasukkan produk pertanian yang belum diproses dalam skema CEPT. Tapi dalam Pertemuan Menteri-mentri Ekonomi ASEAN (AEM) yang ke 26, September 1994 diputuskan untuk memasukkan produk-produk tersebut dalam skema CEPT. Produk pertanian yang belum diproses tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori yakni, (a) *Immediate Inclusion List*; (b) *Temporary Exclusion List*; dan (c) *Sensitive List*.

Disamping itu ada juga beberapa pengecualian, yang disebut dengan *General Exception List*, yakni produk-produk yang dikecualikan (tidak termasuk skema CEPT) karena alasan keamanan nasional (*national security*), perlindungan kehidupan manusia, binatang atau tanaman dan alasan kesehatan, serta perlindungan benda yang memiliki nilai arstistik, historis dan arkeologis.

Pengurangan Hambatan Non Tarif (NTBs)

Pada ASEAN Summit V yang diadakan di Bangkok, Desember 1995 ditegaskan kembali komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk menghilangkan seluruh hambatan kuantitatif (tarif) dan non tarif. Selanjutnya pada Pertemuan Puncak (*Summit*) tersebut mengamanatkan agar negara anggota meningkatkan transparansi dalam upaya mencapai standar internasional dan meningkatkan kerjasama bilateral atau plurilateral sehingga tercipta perdagangan antar negara anggota ASEAN yang lebih besar (*trade creation*).

Dalam rangka menyebarkan luas informasi tentang standarisasi dan penilaian konformitas, ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality (ACCSQ) telah menerbitkan 7 jilid buletin mengenai standar dan kualitas. Disamping itu dicetak pula 2 jilid *Directory of the ASEAN Contact Points for Standard and Quality*. Juga di bangun ASEAN Homepage

on Standards and Conformity Assessment (URL address: <http://www.aseansec.org>).

Disamping ditetapkan peraturan-peraturan mengenai penurunan tariff dan bukan tariff, AFTA juga mengeluarkan kesepakatan tentang harmonisasi peraturan yang berlaku di negara anggota ASEAN.

Untuk tujuan *harmonisasi standar* produk-produk yang paling banyak diperdagangkan di lingkungan negara-negara ASEAN telah ditetapkan 20 kelompok produk, yang sebagian besar produk tahan lama, yakni (1) alat pendingin ruangan (AC); (2) kulkas; (3) radio; (4) telpon; (5) televisi (TV); (6) peralatan video; (7) *printed circuits*; (8) monitor dan generator; (9) monitor dan keyboard; (10) *mounted piezo-electric crystal*; (11) dioda; (12) suku cadang TV dan radio; (13) penguat suara dan suku cadangnya; (14) induktor; (15) kapasitor; (16) resistor; (17) *switches*; (18) tabung sinar katoda; (19) sarung tangan karet; (20) kondom karet.

Harmonisasi standar produk tersebut dilaksanakan melalui penyesuaian standar produk negara masing-masing anggota ASEAN dengan standar produk internasional seperti yang dibuat oleh *International Standard Organisation (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)* and *International Telecommunication Union (ITU)*. Harmonisasi tersebut diselesaikan akhir tahun 2000.

Disamping itu juga 14 jenis produk pertanian (*agricultural products*) diprioritaskan untuk diharmonisasi. Produk-produk tersebut meliputi, beras, mangga, kelapa, jahe, dendrobium, kacang tanah, kubis bulat, merica hitam, kentang, bawang merah, jeruk, kopi, nenas dan pisang.

Untuk meningkatkan perdagangan sayur-sayuran di wilayah ASEAN, negara-negara anggotanya juga mengharmonisasikan *Maximum Residual Limits (MRLs)* pestisida untuk sayur-sayuran. Harmonisasi MRL tersebut meliputi 10 jenis pestisida, yaitu; *cabaryl*,

carbofuran, *methomyl*, *malathion*, *diazinon*, *prothiophos*, *triazophos*, *parathion-methyl*, *cypermethrin* dan *endosulfan*.

Untuk memfasilitasi perdagangan vaksin binatang, ASEAN juga menerbitkan *Manuals for Animal Vaccines*.

Akselerasi Pelaksanaan AFTA

Karena krisis ekonomi dan keuangan Juli 1997 dan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dunia bisnis, mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemimpin-pemimpin (*Leaders*) ASEAN bertekad merealisasikan AFTA secepat mungkin. Disamping itu juga disetujui untuk memberikan insentif khusus dan kemudahan-kemudahan untuk menarik investasi asing langsung ke wilayah ASEAN. Untuk mempercepat pelaksanaan AFTA, Enam (6) Pemimpin negara ASEAN yang pertama kali menandatangani Skema CEPT - Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand - setuju implementasi AFTA dimajukan satu tahun, dari tahun 2003 menjadi 2002. Percepatan pelaksanaan AFTA per 1 Januari 2003 ditanggapi berbagai pihak di Indonesia secara beragam. Ada yang kurang setuju karena kondisi perekonomian Indonesia belum pulih benar dari krisis ekonomi dan keuangan tersebut. Tapi sebagian lagi menyatakan Indonesia harus ambil bagian dalam proses akselerasi tersebut.

Mereka juga sepakat untuk mencapai minimum 90% dari keseluruhan tarif diturunkan menjadi 0-5% pada tahun 2000. Ini berarti mencapai 90% dari volume perdagangan antar anggota negara ASEAN. Sedangkan untuk negara anggota ASEAN yang baru seperti Vietnam diberi kelonggaran waktu sampai tahun 2003, Laos dan Myanmar pada tahun 2005.

Tantangan dan Peluang Serta Kebijakan Apa Yang Perlu Diambil?

Tinjauan teoritis sebelumnya menggambarkan bahwa suatu

pengurangan atau penghilangan tarif akan mengakibatkan suatu negara kembali bersaing pada harga ekuilibrium dunia. Kunci utama dalam akibat penghilangan tarif sangat tergantung dengan kondisi konsumen dan produsen Indonesia di Asia Tenggara. Respon konsumen dan produsen merupakan titik inti utama dari akibat penurunan harga.

Pelepasan tarif akan menggeser produsen dalam negeri yang tidak dapat berkompetisi pada harga ekuilibrium dunia. Pelepasan tarif akan menggeser produsen dalam negeri ke produsen luar negeri yang lebih efisien. Efisiensi produsen dalam negeri akan menjadi titik tumpu utama dalam memenangkan bisnis internasional dalam perdagangan bebas. Tantangan ini perlu selalu menjadi perhatian bagi produsen dalam negeri untuk dapat selalu meningkatkan efisiensi. Mulai dari Adam Smith (1776), David Ricardo (1817), hingga Porter (1980, 1985, 1990) menekankan betapa pentingnya setiap perusahaan dan atau negara mempunyai keunggulan (*advantages*). Smith percaya produktivitas mutlak tenaga kerja merupakan determinan utama dalam meraih keunggulan. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui pembagian tenaga kerja (*division of labor*). Perusahaan yang memiliki tenaga kerja yang produktif akan mampu bersaing di pasar global. Porter (1990) secara tegas menyatakan perusahaan-perusahaan (*firms*) atau industri tertentu yang berkompetisi di pasar internasional, bukan negara (*nations*).

Ada 5 kekuatan (*competitive forces*) yang menentukan daya saing suatu industri yaitu, (1) ancaman pendatang baru; (2) kekuatan tawar menawar pembeli; (3) kekuatan tawar menawar pemasok; (4) ancaman produk substitusi atau jasa; (5) persaingan di antara perusahaan yang ada. Ke lima faktor tersebut menentukan struktur suatu industri (*industry structure*). Struktur industri Indonesia masih relatif lemah dan dangkal. Diperlukan kebijakan industri yang

dapat memperkuat dan memperdalam struktur industri. Karena kebijakan industri sangat berkaitan erat dengan kebijakan perdagangan.

Untuk meraih keunggulan kompetitif, perusahaan haruslah merumuskan strategi yang kompetitif atau strategi generik (Porter, 1985), yang meliputi; (a) *cost leadership*; (b) *cost focus*; (c) *product differentiation* dan (d) *focused differentiation*. Dengan menerapkan strategi tersebut, Korea dan Cina sebagai pemain baru telah sukses dalam kancah gelanggang bisnis internasional. Korea dengan industri mobil dan galangan kapal-dengan menerapkan strategi *cost leaderships*. Sedangkan Jepang dalam mengembangkan industri galangan kapalnya menggunakan strategi *differentiation*. Cina yang juga unggul dengan industri galangan kapalnya mengaplikasikan strategi *cost focus*.

Perusahaan yang telah berhasil dalam bisnis global dituntut pula untuk terus menerus menciptakan dan mempertahankan keunggulannya (*sustainability*). Keunggulan itu sendiri sebetulnya memiliki sifat dinamis. Sifat dari suatu kompetisi ekonomi tidaklah "equilibrium". Perbaikan, peningkatan mutu dan inovasi dalam suatu industri merupakan proses yang tiada henti. Keunggulan yang dimiliki saat ini dapat segera hilang atau perlahan-lahan akan lenyap. Dalam hal memelihara kelangsungan hidup suatu industri, peranan pemerintah (negara) sangatlah penting. Keunggulan perusahaan saja tidaklah cukup, tapi diperlukan keunggulan nasional (*national advantage*).

Mengapa suatu negara dapat sukses dalam industri tertentu di percaturan bisnis internasional? Jawabannya terletak pada 4 faktor yang membentuk lingkungan dimana perusahaan berada (Porter 1990). Keempat determinan tersebut adalah; (1) kondisi faktor produksi, seperti tenaga kerja terampil, lahan, sumber daya alam, modal

dan infrastruktur; (2) Kondisi permintaan domestik (perekonomian domestik), misalnya komposisi permintaan, pola dan besarnya permintaan domestik; (3) Kondisi industri pendukung dan industri terkait; (4) Strategi perusahaan, struktur dan pesaing. Disamping keempat determinan tersebut peranan Pemerintah melalui kebijakan publiknya sangatlah mempengaruhi, seperti halnya yang terjadi di Jepang (dengan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri, MITI; yang sejak 6 Januari 2000 diubah menjadi *Ministry of Economy, Trade and Industry*, disingkat METI). Malaysia meniru Jepang dengan membentuk kementerian yang sama.

Peranan peluang (*chance*) juga tidak kalah pentingnya, misalnya kejadian ekonomi (perubahan paar keuangan dunia, kenaikan harga minyak); peristiwa politik (pemerintahan baru, perang) dan penemuan baru (bioteknologi, mikroelektronika) akan mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu bangsa.

Strategi produsen atau perusahaan untuk memenangkan kompetisi yang semakin ketat tergantung pada lingkungan internal perusahaan dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal antara lain, kualitas sumber daya manusia, penurunan biaya produksi relatif dapat dilakukan perusahaan. Lingkungan eksternal, terutama lingkungan makroekonomi diluar kendali perusahaan, misalnya hutang luar negeri yang besar, defisit fiskal, sistim kurs yang dianut, sistim perbankan, kondisi infrastruktur (telekomunikasi, transportasi, listrik dan sebagainya) yang masih kurang, kebijakan pengembangan kelembagaan dan efektivitas berbagai kebijakan publik lainnya.

Peluang yang muncul dalam perdagangan bebas adalah adanya kemungkinan untuk melakukan kerjasama (*cooperation*). Kerjasama antar negara-negara ASEAN jelas merupakan peluang yang dapat diraih Indonesia. Peningkatan perdagangan (ekspor dan impor) diantara

negara-negara anggota ASEAN intra-industri trade (IIT)-- harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. IIT tersebut akan berkembang pesat dalam AFTA karena karakteristik negara-negara anggota ASEAN mendukung, misalnya, factor "*learning by doing*" diantara anggota atau yang dikenal dengan istilah *dynamic economies of scale*. Perbedaan distribusi pendapatan total diantara negara anggota juga akan memacu perdagangan diantara anggota (Grubel 1970), misalnya, menurut World Bank (*World Development Indicators*, 2001) pada tahun 2000, Gross National Income (GNI) Singapura sebesar US\$ 95.420 juta (GNI per capita US\$ 24.150), Indonesia sebesar US\$ 125.043 juta (GNI per capita US\$ 600), Vietnam sebesar US\$ 28.733 juta (GNI per capita US\$ 370).

Disamping kerjasama, akan terjadi pula persaingan (*competition*) antara negara-negara ASEAN tersebut. Dibutuhkan kerangka pikir baru (*new mindset*); bagaimana mengkombinasikan kerjasama dan kompetisi sekaligus. Brandenburger (Harvard Business School) dan Nalebuff (Yale School of Management), 1996, memperkenalkan pendekatan Teori Permainan (*Game Theory*) dalam dunia bisnis. Negara-negara ASEAN yang independen itu harus bermain dalam lapangan bisnis/perdagangan dengan aturan (*rules*) yang telah mereka setuju. Setiap pemain memiliki tujuan masing-masing. Semuanya pasti ingin menang. Indonesia tentunya diharapkan menjadi pemenang (*the winner*), bukan pecundang (*the loser*). Masing-masing negara ASEAN diharapkan menjadi pemenang (*positive sum win-win game*), bukan satu menang, yang satu kalah (*the zero sum game*). Indonesia harus menghindari *zero sum game* tersebut. Perbedaan karakteristik antara negara anggota ASEAN akan menjadikan permainan strategis (*strategic game*) di arena bisnis wilayah AFTA semakin menarik dan seru.

Solusi yang diharapkan adalah semua negara anggota akan mencapai keseimbangan Nash (*Nash equilibrium*).

Dengan terealisasinya AFTA 1 Januari 2002, terciptalah pasar yang lebih luas. Arus investasi asing langsung (FDI) akan meningkat. Kerjasama perdagangan akan semakin luas dan dalam. Bagi Indonesia, khususnya, diharapkan terjadi perluasan perdagangan (*trade creation*) karena hilangnya berbagai distorsi dalam perdagangan internasional-- sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Kerjasama ASEAN dengan negara-negara di luar kesepuluh anggota ASEAN, seperti Cina, Jepang dan Korea akan memberikan peluang yang besar. Cina yang telah menjadi anggota *World*

Trade Organization (WTO), ekonominya tumbuh pesat dimana perdagangannya dengan ASEAN mencapai US\$ 40 milyar per tahun. Jepang yang memiliki modal besar dan teknologi maju merupakan mitra dagang terpenting ASEAN tentu akan ambil bagian dalam kerjasama tersebut. Kemajuan industri dan perdagangan luar negeri Korea akan memberikan inspirasi dan rangsangan cukup berarti bagi ASEAN. Indonesia harus melakukan aliansi strategis (*strategic alliances*) dengan negara patner dagang utamanya, misalnya Jepang, Amerika Serikat, Jerman. Tak kalah pentingnya Indonesia juga harus terus menerus memasarkan dirinya sendiri di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Daftar Pustaka

- Krueger, Anne O, *Trade Policies In Developing Countries*, in Handbook of International Economics, Vol 1, Chapter 11. Edited by R.W Jones and P.B. Kenen, Elsevier Science Publishers B.V. 1984.
- Jovanovic N. Miroslav, *International Economic Integration: Limits and Prospect*, Routledge, London, 2000
- Pugel A. Thomas, and Lindet H. Peter, *International Economics*, Irwin McGraw-Hill, 1999.
- Brandenburger M. Adam and Nalebuff J. Barry, *Co-opetition*, Bantam Publishing Group, NY, 1996.
- Hamel, Gary and Prahalad C.K., *Competing for the Future*, Harvard Business Scholl Press, Boston, 1994.
- Krugman R. Paul., *Strategic Trade Policy and the New International Economics*, MIT Press, Cambridge, MA, 1988.
- Thomas, Vinod and Nash, John, *Best Practices in Trade Policy Reform*, Oxford University Press, Washington, 1991.
- Porter, M, *The Competitive Advantage Of Nations*, The Free Press, NY, 1990
- , *Competitive Advantages : Creating and Sustaining Superior Performance* The Free Press, London, 1985
- Morash, Karl, *Strategic alliances: a substitutes for strategic trade policy?*, Journal of International Economics, 52(2000) p.37-67.
- Bhagwati N. Jagdish, *International Trade : Selected Reading*, Second Edition, MIT Press, Cambrigde, MA, 1987.
- Besanko, Dranove, Shanley, *Economics of Strategy*, John Wiley & Son, 1997.
- Kotler, Jatusripitak, Maesinge, *The Marketing of Nations: A Strategic Approach To Building Nation Wealth*, The Free Press, 1997.

Smith, Adam. *The Wealth of Nations, Books I III*, Penguin Books 1997.

Appleyard R Dennis and J. Alfred, *International Economics*, 3rd Edition, Irwin McGraw-Hill, 1998.

Rasmusen, Eric, *Games And Information : An Introduction to Game Theory*, Basil Blackwell, 1989.

Osborne, Martin and Rubinstein, Ariel, *A Course In Game Theory*, MIT Press, Cambridge, MA, 1994.

Anderson, Kym and Blackhurst, Richard (Ed.), *Regional Integration and The Global Trading System*, Harvester/Wheatsheaf, NY, 1993.

Grubel, Herbert G., *The Theory of Intra-Industry Trade*, in *Studies in International Economics*. Edited by I.A. McDougal and R.H. Snape, Amsterdam: North-Holland, 1970. Pp. 35-51.

"Jika orang tidak tahu pelabuhan mana yang akan dia tuju,
segala arah mata angin merupakan arah yang benar"
(Sereca)